

INOVASI PELAYANAN ELEKTRONIK DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Ajeng Kusuma

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ajeng.18035@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Di negara Indonesia, penyelenggara layanan publik dilaksanakan oleh ASN yang berperan dalam meningkatkan pembangunan serta kemajuan negara. Namun pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih kurang efektif dan efisien terhadap pemberkasan DUPAK sebab dilakukan secara manual yang berdampak pada kelangsungan karir pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi berbasis elektronik (e-DUPAK). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara, subjek penelitiannya adalah pegawai Jabatan Fungsional Tertentu. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori difusi inovasi menurut Rogers memuat 5 indikator dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1) keuntungan relatif mendorong terciptanya pembaharuan metode yang digunakan saat pengurusan DUPAK, 2) kesesuaian pengelolaan DUPAK secara elektronik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan kegiatan pemerintah, 3) kerumitan mengenai respon kepuasan para pemangku kepentingan pengguna E-DUPAK menyebutkan bahwa kegiatan pengurusan angka kredit jauh lebih mudah, 4) kemungkinan mencoba adanya E-Dupak di Dinas Kesehatan telah lolos uji coba dalam mempermudah peserta unggah dokumen untuk peningkatan karir pegawai dan mendorong petugas memberikan pelayanan dengan baik, 5) kemudahan diamati pada proses DUPAK dapat terlaksana dengan baik sampai proses akhir. Namun, terdapat faktor penghambat E-Dupak yaitu, 1) sumber daya manusia, kurangnya tenaga IT yang berkompeten pada pelaksanaan e-Dupak, 2) half implemented, belum sepenuhnya sistem e-DUPAK maka perlu dilakukan penyempurnaan agar proses pengajuan DUPAK tidak ada hambatan, 3) Anggaran, keterbatasan biaya yang dialokasikan dalam pembuatan aplikasi e-DUPAK yaitu sebesar 95.000.0000 sehingga dirasa masih belum maksimal pada fitur-fitur yang disajikan pada website e-DUPAK.

Kata Kunci: inovasi, e-dupak, peningkatan karir.

Abstract

Within the nation of Indonesia, open benefit suppliers are carried out by respectful hirelings who play a part in expanding the advancement and advance of the nation. Be that as it may, administrations at the East Java Common Wellbeing Office are still not successful and productive in terms of DUPAK recording since it is done physically which has an affect on worker career coherence. This ponder points to analyze the application of electronic-based development (e-DUPAK). The investigate strategy utilized is subjective with information collection strategies from perceptions and interviews, the investigate subjects are representatives of certain utilitarian positions. To analyze the creator employments the hypothesis of development dissemination concurring to Rogers contains 5 markers with the taking after inquire about comes about, 1) relative advantage energizes the creation of reestablishment of the strategy utilized when organizing DUPAK, 2) reasonableness of electronic DUPAK administration will ensure the accessibility of prove of choices on government exercises, 3) complexity with respect to the reaction to the fulfillment of partners utilizing E-DUPAK, it was expressed that the action of proposing credit scores was much simpler, 4) the plausibility of attempting E-Dupak at the Wellbeing Benefit had passed trials in making it less demanding for members to transfer records for career progression and empowering officers to provide administrations with great, 5) the ease of being watched within the DUPAK prepare can be carried out legitimately until the ultimate prepare.

Keywords: innovation, e-dupak, career advancement.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebijakan pemerintah daerah terus mengalami penyempurnaan, hingga munculnya konsep desentralisasi membuat kota menjadi lebih fleksibel yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dengan memikul tanggung jawab penuh atas terselenggaranya pelayanan publik di bidang jasa, administrasi maupun barang. Dengan ini, pemerintah harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi tanpa terkecuali, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip dan kewajiban pemerintahan yang baik.

Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Di era reformasi birokrasi di sektor publik, masyarakat berharap birokrasi pemerintah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga, pemerintah mampu memberikan pelayanan yang tepat, cepat, efisien, efektif, konsisten dan bertanggung jawab. Idealnya, layanan publik bisa dikatakan efektif apabila birokrasi pelayanan dari output yang dihasilkan dan digunakan untuk melihat pemberian layanan kepada masyarakat tanpa disertai adanya paksaan untuk membayar biaya tambahan seperti sumbangan sukarela, suap, dan berbagai biaya lainnya dalam proses pelayanan yang telah berlangsung. (Azmy dkk, 2020)

Menurut Arsalim dalam Puspita Sari (2018) Konsep dasarnya pelayanan publik adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan menurut pendekatan ekonomi yang menyediakan kebutuhan dasar bagi semua seiring dengan globalisasi yang sekaligus menawarkan peluang tantangan untuk memperbaiki perekonomian dan memaksa pemerintah untuk memahami kembali makna pentingnya kualitas pelayanan dan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi.

Salah satu penyedia pelayanan publik yang berkualitas yaitu dapat memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang menurun karena krisis ekonomi saat ini. Hal ini menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat semakin penting untuk diterapkan. Sebab,

pada dasarnya masalah terbesar adanya pelayanan publik mengacu pada peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Perlu diketahui, kualitas pelayan publik tergantung pada beberapa aspek antara lain kelembagaan, pola penyelenggaraan, dan dukungan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam berfikir dan berperilaku. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap kegiatan pemerintah dan menjadi fokus untuk bertahan di era globalisasi. Meski didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pemerintahan tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai maka tugas pemerintah tidak akan terselesaikan dengan baik. Sebab, sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam menentukan berhasil tidaknya sebuah birokrasi dalam mengembangkan, mempertahankan dan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perubahan dinamika dalam lingkungan. Selain itu, menurut Hasibuan dalam Herawati (2018) sumber daya manusia memiliki aspek yang cukup luas dan memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintah yaitu perilaku, pengetahuan, sikap dan perkembangannya.

Ruhana dalam Samsudin (2021) mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar manajemen teknologi informasi yang mempengaruhi hasil kerja pemerintah. Maka, sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri dengan rencana yang dirancang oleh pemerintah. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas juga bisa diperoleh dari pendidikan formal atau non formal seperti pelatihan, pembelajaran dan pengembangan berbasis kompetensi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai atau berkompeten agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan sumber daya aparatur pelayanan publik menjadi gerbang utama untuk penyelenggaraan negara. Hal ini diperkuat hasil penelitian Rizqi dan Amaliyyah (2021) mengatakan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam terhadap kualitas pelayanan publik.

Pada saat ini untuk mengikuti perkembangan jaman pemerintah harus memikirkan dampak sumber daya aparaturnya agar benar-benar memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Maka pemerintah menyediakan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dikolaborasi dengan sumber daya aparatur sipil negara yang memadai guna untuk upaya optimalisasi. Salah satu tujuan pengimplementasian ini

ialah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih baik kepada masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah terkait dalam bidang kesehatan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Negara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mana menjelaskan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ialah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selain itu penelitian ini berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

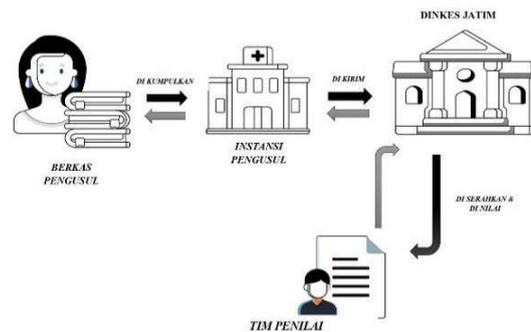
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya yaitu dengan membuat terobosan aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, angka kredit merupakan nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Sedangkan angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Tujuan dari Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit ialah untuk mempermudah pegawai Aparatur Sipil Negara dalam proses kenaikan jabatan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berikut merupakan daftar Jabatan Fungsional Tertentu di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 1. Nama Jabatan Fungsional Tertentu

Teknisi Elektromedis	Dokdiknis
Apoteker	Okupasi Trapis
Pem. Kesehatan Kerja	Bidan
Pranata Lab. Kesehatan	Pranata Anestesi
Perekam Medis	Dokter Gigi
Refraksionis Optisien	Perawat
Psikolog Klinis	Sanitarian
Terapis Wicara	Radiographer
Perawat Gigi	Fisioterapis
Dokter	Ortotis Prostetis
Asisten Dokter	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Fisikawan Medis	Ast. Penata Anestesi
Nutrisionis	Adm. Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur

Berdasarkan penelitian Kusmayadi (2020) menyatakan bahwa DUPAK digunakan sebagai indikator kinerja pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam proses pengumpulan berkas yang dilakukandalam kurun waktu enam bulan dan setahun sekali. Namun, menurut peneliti DUPAK ini perlu diterapkan guna adanya rekam data kinerja pegawai pejabat fungsional tertentu dalam upaya peningkatan karir. Berdasarkan table diatas terdapat 26 Jabatan Fungsional Tertentu yang bekerja Rumah sakit Daerah (RSUD) di bawah naungan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan skema alur dalam proses pengajuan DUPAK



Gambar 1. Alur Pengajuan Dupak

Sumber: Wawancara Nasumber

Pada proses pengumpulan berkas pengajuan DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur awalnya menggunakan metode manual yaitu pegawai yang ingin meningkatkan karirnya wajib mengajukan persyaratan DUPAK yang telah ditetapkan, kemudian berkas tersebut dikumpulkan di bagian kepegawaian di instansi tempat pegawai tersebut bekerja selanjutnya instansi tersebut akan mengirimkan berkas pengajuan DUPAK ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersamaan dengan pegawai lainnya yang ingin mengajukan peningkatan karirnya. Setelah berkas tersebut sampai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maka berkas tersebut akan dikumpulkan dan dipilah berdasarkan jabatan fungsionalnya lalu akan di nilai oleh tim penilai. Hal tersebut di rasa kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama sampai terbitnya Angka Kredit (AK) dan dirasa kurang efisien dari segi biaya yaitu untuk pemenuhan persyaratan DUPAK dan biaya ongkos kirim yang di bebaskan oleh instansi. Kekurangan lain yaitu adanya human eror seperti terdapat persyaratan yang kurang maupun adanya kehilangan data saat pengumpulan sehingga berkas pengajuan yang kurang tersebut dimungkinkan akan ditolak, adanya duplikat data, kurang adanya informasi yang akurat sampai mana

berkas tersebut ataupun berkas pengajuan DUPAK tersebut di verifikasi maupun di tolak.

Pada proses pemberkasan DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dirasa masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya dokumen pegawai yang tertumpuk setiap periode pengajuan DUPAK, sehingga berdampak pada data daftar usulan tidak terinput dengan baik. Dalam kurun waktu satu periode pengusulan penilaian usulan bisa sampai 500 usulan sehingga berkas menumpuk dan menyita banyak waktu untuk mengkoreksi satu persatu berkas yang diajukan oleh pengusul. Berikut merupakan berkas DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. Berkas Administrasi DUPAK

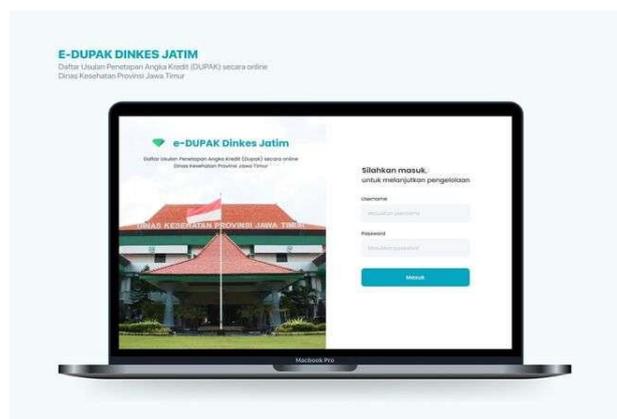
Sumber: Dokumentasi oleh peneliti di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Sistematikan penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit terdiri dari cover, berkas administrasi (data dukung), form rincian butir kegiatan (form DUPAK), surat pernyataan, rekapitulasi, bukti fisik dan data dukung bukti fisik. Namun karena banyaknya masalah mengenai DUPAK di instansi dibuktikan dengan beberapa pernyataan diantaranya Kusmayadi (2020) kendala DUPAK disebabkan oleh tidak mengerti redaksi, format dan penyusunan DUPAK dari buku petunjuk teknis, tidak memahami pentingnya bukti fisik hasil kerja, sehingga tim penilai harus mengolah agar menjadi laporan yang sesuai dengan pedoman dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu menurut Muslihuddin dan Eka (2017) microsoft excel dan tidak memiliki database informasi karyawan sehingga menimbulkan masalah pada laporan akhir penentuan nilai kredit dan mengurangi efisiensi kerja. Sedangkan menurut Hepi (2015) dokumen DUPAK tidak diproses secara mendalam oleh satu pintu oleh penerima dokumen di ULT dan tidak ada pemantauan proses penilaian hingga akhir.

Dari penjelasan dan gambar diatas maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur perlu melakukan perubahan teknis pada pelaksanaan DUPAK, yang awal

mula dilaksanakan secara manual kemudian beralih dengan inovasi baru yaitu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi di era 4.0. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi dalam memberikan pelayanan membuat teknologi berbasis website semakin berkembang, salah satunya dalam mengelolah data dan menghasilkan informasi. Pengembangan sistem website ini menghadirkan efektifitas dan efisiensi di berbagai elemen tanpa terkecuali di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sehingga memberikan dampak positif terhadap penggunanya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membuat terobosan aplikasi berbasis website yaitu e-DUPAK untuk memudahkan para pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu untuk meningkatkan karir pegawai secara efektif dan efisien dari segi waktu maupun biaya namun aplikasi ini tidak mengubah atau mengurangi komponem struktur yang ada didalamnya. Aplikasi ini rilis pada bulan Agustus Tahun 2021 pada saat pandemi Covid-19 yang menjadi terobosan disaat pelayanan dan instansi menerapkan *Work From Home (WFH)*. Pada saat pandemi Covid-19, usulan dupak diganti dengan berkas softcopy yang dikirimkan melalui website resmi e-DUPAK yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pada awal rilis e-DUPAK ini masih banyak fitur-fitur yang masih belum lengkap atau sempurna dan masih banyak evaluasi baik dari tim penilai maupun pengusul, hal tersebut menyebabkan banyak kendala dan kekurangan baik dari segi aplikasi maupun pengguna e-DUPAK. Berikut ini merupakan tampilan utama website e-DUPAK

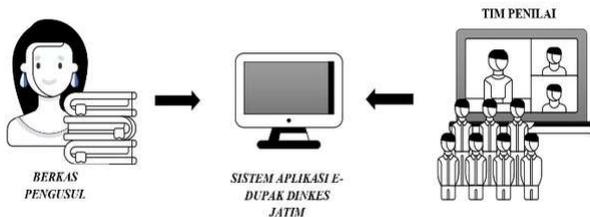


Gambar 3. Tampilan Utama E-DUPAK

Sumber: Website E-Dupak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Penerapan sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (e-DUPAK) pada Jabatan Fungsional Kepegawaian berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis Kepegawaian di

lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sistem ini menyediakan database jabatan fungsional kepegawaian yang *up to date*. Tujuan lain dari e-DUPAK yang di terapkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian yang lebih efektif dan efisien dalam menyusun dan mengusulkan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu. Berikut ini merupakan skema alur pengajuan usulan DUPAK menggunakan sistem aplikasi e-DUPAK



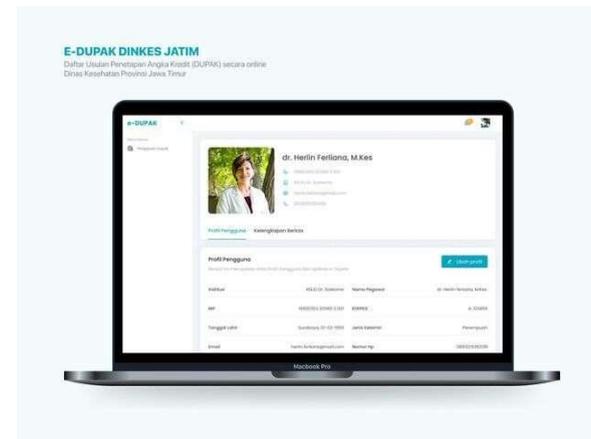
Gambar 4. Alur Pengajuan berkas di e-DUPAK

Sumber: Wawancara Narasumber

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa pada proses pengajuan DUPAK melalui website e-DUPAK jauh lebih efektif dan tidak berbelit-belit dibandingkan pengajuan DUPAK secara manual. Pengusul hanya mengupload berkas data kedalam website e-DUPAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditentukan dan Pengusul bisa mengusulkan pengajuan berkas dimana saja dan kapan saja. Informasi persyaratan pengajuan lebih akurat dan pemberitahuan yang jelas kepada pejabat fungsional kepegawaian dalam proses pengusulan angka kredit, transparansi dalam memberikan pelayanan penilaian dan penetapan angka kredit, mempermudah dalam pelaksanaan proses verifikasi dan proses penilaian usulan angka kredit. Sedangkan dari tim penilai juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengoreksi usulan yang telah diusulkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan demikian penerapan sistem aplikasi e-DUPAK dapat meminimalisir sistem birokrasi dan terciptanya peningkatan standarisasi proses. Disamping itu, sistem aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional kepegawaian dalam pengajuan usulan penetapan angka kredit dan percepatan proses usulan DUPAK. Kemudahan-kemudahan tersebut dapat mengurangi tindakan penyimpangan sehingga tata laksana pemerintahan dapat diterapkan dengan baik (good governance dan good government).

Pada website e-DUPAK tidak hanya untuk keperluan kenaikan jabatan saja melainkan perpindahan dari jabatan lain, PAK Temporer atau mempertahankan jabatan, pengangkatan pertama, pemberhentian sementara

atau pengangkatan kembali dari tugas belajar, dan alih kategori keterampilan ke keahlian. Berikut ini adalah tampilan pengguna e-DUPAK.



Gambar 5. Tampilan Profil Pengguna E-DUPAK

Sumber: Website E-Dupak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dari pemaparan diatas bisa dilihat bahwa fitur profil peserta hanya menampilkan data pribadi dan berkas yang telah diunggah sehingga tim penilai hanya bisa melihat saja, hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Maya selaku Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Jawa Timur memaparkan bahwa dari awal rilis e-DUPAK ini masih belum dilengkapi fitur komentar yang diberikan oleh tim penilai, pada tampilan diatas juga belum tertera keterangan terakhir dilihat oleh tim penilaian sehingga terjadi pengulangan pengecekan data pribadi oleh tim, selain itu juga masih belum terdapat pencetakan dokumen yang diunggah oleh peserta, sehingga dengan banyaknya kekurangan fitur tersebut masih diperlukannya evaluasi kembali dengan melibatkan setiap peengguna e-DUPAK rumah sakit yang dibawah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan menghadiri sosialisasi fitur mengenai e-DUPAK.

Seiring berjalannya waktu, banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan dan di evaluasi untuk aplikasi e-DUPAK saat rapat pleno, namun pelaksanaannya mengalami hambatan karena disebabkan oleh keterbatasan biaya yang dialokasikan untuk pembuatan Aplikasi e-DUPAK yang bersumber dari DPPA Mendahului II Provinsi Jawa Timur dari Anggaran 2021 Nomor 914/7.P/203.2/2021 sebesar Rp. 95.000.000,00 sudah termasuk Ppn.

Contoh penerapan E-DUPAK pada Lembaga Sandi Negara oleh Fariz (2021) bahwa setiap pengguna bisa mendapatkan informasi dan dapat melakukan pengintegrasian data antar pengguna sehingga dapat dikatakan sistem yang di bangunnya berhasil sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Lalu penilaian angka kredit dosen berbasis web di Kopertais Wilayah I

DKI Jakarta oleh Chotib (2020) bahwa pengurusan kenaikan jabatan secara online membuat prosesnya lebih efektif dan efisien dimana bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Serta menurut Kusmayadi (2020) penerapan DUPAK online pustakawan di Kementerian Pertanian menyatakan bahwa meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam proses penyusunan DUPAK pustakawan di lingkungan Kementerian.

Maka untuk mengkaji lebih lanjut, peneliti mengambil pendapat dari Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul '*Diffusion Innovations*' tahun 1964 yang menjelaskan secara rinci apa saja aspek-aspek difusi inovasi E-DUPAK dalam meningkatkan kinerja pegawai sebagai berikut:

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relatif

Dalam sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan atau nilai lebih yang menjadikan perubahan yang mendasar dari inovasi sebelumnya.

2. *Compability* atau Kesesuaian

Inovasi harus mempunyai sifat keserasian yang saling berkaitan atau sesuai dari inovasi yang sebelumnya.

3. *Complexity* atau kerumitan

Menjadikan perubahan dalam bentuk inovasi memberikan sifat yang baru maka tingkat kerumitan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya.

4. *Triability* atau kemungkinan mencoba

Inovasi bisa diterima dan dijalankan apabila terbukti mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya.

5. *Observability* atau kemudahan diamati

Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan keuntungan yang lebih mudah dari pada inovasi yang terdahulu setelah diuji, diamati dan dirasakan perbandingan perubahannya.

Menurut peneliti dengan menerapkan aspek tersebut akan bermanfaat dalam menganalisis faktor penghambat dalam penerapan E-DUPAK. Sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menerapkan E-DUPAK yang bertujuan memaksimalkan pelaksanaan peningkatan jabatan pegawai pejabat fungsional tertentu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka dari pemaparan tersebut, peneliti terdorong melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan pelayanan elektronik daftar usulan penilaian angka kredit dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dasar teori yang digunakan adalah teori Roger yang terdiri dari lima aspek yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan mencoba, kemudahan diamati. Dari kelima aspek tersebut dimiliki oleh penyelenggara daftar usulan penilaian angka kredit khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam rangka mengetahui dan memahami transparansi informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan penelitian ini yang menjadi populasi atau keseluruhan subjek penelitian Arikunto (2016) adalah pegawai yang mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah kajian inovasi E-Dupak dalam peningkatan karir pegawai yang berhubungan dengan kinerja dalam pengembangan karir pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam pengambilan datanya dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu secara langsung atau *offline* maupun secara tidak langsung yaitu online sehingga peneliti tidak perlu terlibat langsung dilapangan (Maksum, 2018).

Informan diambil menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pegawai yang mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian akan diperoleh data yang berhubungan dengan narasumber atau informan yang bersifat independen yaitu pegawai yang mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selain itu peneliti juga menggali data terkait dengan penerapan E-Dupak yang disesuaikan dengan pendapat Roger yaitu 1) *relative advantage* atau keuntungan relatif, 2) *compability* atau kesesuaian, 3) *complexity* atau kerumitan, 4) *triability* atau kemungkinan mencoba, 5) *observability* atau kemudahan diamati. Setelah itu penulis melakukan analisis data, sehingga dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan dan disimpulkan dihasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian, penulis berhasil melengkapi beberapa informasi yang diperlukan untuk mengacu pada transparansi informasi inovasi E-Dupak dalam peningkatan karir pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Everett Rogers. Informasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Inovasi E-Dupak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang

baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Berdasarkan peraturan ini menyebutkan inovasi merupakan ide atau gagasan untuk membangun dan memperbaiki tetapi dapat didefinisikan secara luas menggunakan ide-ide baru untuk menciptakan produk, proses, dan layanan agar dapat meningkatkan karir pegawai. Tujuan diselenggarakannya inovasi untuk mempercepat terwujudnya kemaslahatan bersama melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan daya saing.

Inovasi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan pelayanan publik yaitu aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengajuan usulan DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian yaitu Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur dalam proses pengajuan usulan DUPAK serta penilaian dan penetapan angka kreditnya. Pegawai yang berkewajiban mengusulkan pengajuan di E-Dupak adalah pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang berkesempatan untuk meningkatkan karir dan kinerjanya maupun kinerja pegawainya yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hertanto selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memaparkan bahwa dengan adanya inovasi elektronik Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (E-DUPAK) dapat menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah yang menunjukkan pemenuhan akuntabilitas jabatan fungsional tertentu, mendukung fungsi dan tugas melalui penciptaan E-DUPAK yang andal serta dapat difungsikan untuk berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mengurangi risiko dengan menjamin bahwa DUPAK yang tepat diciptakan untuk mempertahankan kinerja dan kontinuitas kegiatan.

Tabel 2. Daftar Instansi dan Jumlah Pengajuan Usulan DUPAK Bulan April di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

NO	INSTANSI	JUMLAH USER	
		INTERNAL	EKSTERNAL
		2745	
JUMLAH		2440	305
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	27	
2	RSUD Dr. Soetomo	513	
3	RSUD Dr. Saiful Anwar	217	
4	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	218	
5	RSUD dr. Soedono Madiun	532	
6	RS Jiwa Menur	71	
7	RSUD Karsa Husada Batu	142	

8	RSUD Husada Prima	76	
9	RSUD Mohammad Noer Pamekasan	82	
10	RSUD Sumberlagah	140	
11	RSUD Dungus	94	
12	RSUD Daha Husada	77	
13	RS Paru Jember	104	
14	RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	62	
15	RS Mata Masyarakat Jawa Timur	70	
16	Laboratorium Herbal Materia Medica Batu	11	
17	Laboratorium Gizi	1	
18	Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	1	
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	2	
20	RSUD Sidoarjo		24
21	Dinas Kesehatan Kota Batu		11
22	RSUD Kertosono		10
23	RSUD dr. R Soedarsono Kota Pasuruan		3
24	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo		12
25	RSUD Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo		23
26	RSUD Blambangan		2
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang		1
28	RSUD Nganjuk		5
29	RSUD Kabupaten Jombang		5
30	RSUD Dr. Iskak Tulungagung		7
31	RSD Balung		4
32	RS Universitas Airlangga		76
33	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun		1
34	RSUD Bangil		2
35	RSUD Genteng		4
36	RSUD Kanjuruhan		2
37	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan		1
38	RSUD SLG		2
39	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo		24
40	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi		0
41	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri		2
42	RSUD Kabupaten Kediri		8
43	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan		13
44	RSJD Atma Husada Mahakam		1
45	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban		9
46	RS Universitas Brawijaya		2
47	RSUD Mardi Waluyo		6
48	RS Daerah Kalisat		1
49	RSUD Bhakti Dharma Husada		5
50	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk		4
51	Dinas Kesehatan Kota Malang		5
52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang		1
53	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan		0
54	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang		8
55	Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo		8
56	RSUD Tugurejo		1
57	Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur		6
58	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan		0
59	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan		0
60	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya		3
61	Badan Narkotika Nasional RI Jawa Timur		0
62	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang		0
63	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep		1
64	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara		2

Sumber : Analis Kepegawaian Donas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tabel diatas menunjukkan sebanyak 64 instansi yang telah bergabung menggunakan dan mengusulkan penilaian DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 2745 pegawai sebagai user pengguna yang telah mengusulkan penilaian DUPAK di Website E-Dupak mendukung inovasi ini tetap dijalankan sebab berhubungan dengan peningkatan karir pegawai, guna mencapai hasil yang telah di tetapkan maka dengan adanya pengembangan karir dapat meningkatkan kemampuan kerja individu secara profesional dalam rangka pencapaian karir yang berkompeten di bidangnya. Menurut Ibu Lili selaku Kabid Sumber Daya Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlah usulan berkas Dupak yang diterima per periode antara 300 sampai dengan 650 berkas hardcopy yang dikirim langsung dari instansi pengusul ke Dinas Kesehatan, dan besar kemungkinan beresiko tidak *terbackup* dengan baik.

Maka, informan menyatakan terdapat beberapa upaya inovasi E-Dupak untuk peningkatan karir pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, upaya tersebut antara lain:

1. Meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian persyaratan pengajuan penilaian DUPAK dan kehilangan data, efektif dan efisien dari segi waktu serta biaya dalam proses pengajuan DUPAK.
2. Memberikan informasi yang cepat, akurat dan ringkas kepada Pejabat Fungsional Tertentu yang sedang mengajukan penilaian Dupak.
3. Mengurangi penggunaan kertas serta memudahkan dalam penilaian Dupak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
4. Memudahkan tim penilaian dari proses penilaian Dupak sesuai ketentuan dan peraturan, efisiensi waktu dalam proses penilaian antara tim penilai dengan tim penilai lainnya.

Penerapan Inovasi E-Dupak Dalam Meningkatkan Karir Pegawai

Dari hasil wawancara dengan informan lain telah memaparkan bahwa pegawai yang belum mengajukan penilaian Dupak tetap melakukan tugasnya sesuai jabatan fungsional dan tanggung jawab serta beban moral sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam tanggung jawab pekerjaan pegawai. Namun pelaksanaan Dupak tetap harus dilakukan di Dinas Kesehatan Jawa Timur secara keseluruhan agar pejabat fungsional paham akan peran dan posisinya sebagai pelayan publik. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dampak inovasi dalam peningkatan karir Pejabat Fungsional Tertentu di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dihubungkan dengan teori Averett Rogers. Teori tersebut terdapat lima indikator antara lain :

Dari aspek ini, peneliti melihat manfaat atau nilai dari inovasi yang diterapkan e-DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini keunggulan atau nilai dapat dilihat dari E-Dupak dalam sistem penerapan yaitu pada sistem sebelum dan setelah diterapkannya inovasi. Pada proses pengajuan usulan DUPAK sebelumnya dilakukan secara manual baik dari proses pengumpulan berkas sampai penilaian DUPAK hingga menjadi nilai Angka Kredit . Seluruh kegiatan administratif atau pemberkasan harus dilampirkan dalam bentuk fisik. Panjangnya proses pengurusan DUPAK ditengah pandemi covid-19 sangatlah tidak efisien. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Maya Mutia selaku Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beliau mengatakan bahwa:

“Pengusulan DUPAK secara manual, jadi pengusul itu mengirimkan berkas ke pengelola kepegawaian masing-masing instansi dan pengelola kepegawaian instansi mengirimkan ke Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur. E-DUPAK ini dibuat pada tahun 2021 dan rilis pada Agustus 2021.” (Wawancara dengan ibu Maya Mutia, 09 Februari 2023)

Hal ini mendorong untuk menciptakan adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam pengurusan DUPAK. Trobosan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ditengah pandemi covid-19 ini adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) (Nakertrans.sumbarprov.go.id, 2021).

Salah satu bentuk inovasi dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi disektor pemerintahan dari DUPAK menjadi e-DUPAK. e-DUPAK merupakan salah satu pelayanan aplikasi berbasis web yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dikembangkan agar penilaian penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian atau e-DUPAK yang berfungsi sebagai sarana monitoring dan pengendalian manajemen administrasi yang menganalisis kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui aplikasi berbasis web, BKN telah mengembangkan sistem dan evaluasi berdasarkan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman (Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian, 2001)

Penyusunan DUPAK yang disusun oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang selama ini menggunakan konsep manual diganti dengan penerapan modul aplikasi elektronik. Dengan mengacu semua peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai jabatan fungsional tertentu dan angka kredit serta e-DUPAK merupakan solusi yang diciptakan secara mudah, efisien, efektif dan komprehensif (dibuat atau dan disimpan) untuk pengelolaan DUPAK dalam format elektronik. E-DUPAK adalah bentuk efisiensi, efektif dan komprehensif untuk pengelolaan DUPAK elektronik dengan mengacu pada semua peraturan tentang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara dan juga solusi yang di siapkan oleh pemerinatahan terkait. (Nakertrans.sumberprov.go.id, 2021).

Tujuan pembuatan aplikasi ini agar mempermudah proses pengajuan usul DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian yaitu Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur dalam proses pengajuan usul DUPAK serta penilaian dan penetapan angka kreditnya (Badan Kepegawaian Negara, 2018).

2. Kesesuaian (Compatibility)

Inovasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan perkembangan zaman. Secara teknis diharapkan dapat memberikan perubahan bagi Pejabat fungsional Tertentu yang ingin mengajukan penilaian Angka Kredit yang awalnya secara manual beralih ke mode layanan berbasis online. Sehingga pegawai tidak beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan kompleks dan rumit namun dengan adanya inovasi ini lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, serta cepat, akurat dan transparan dalam proses pengajuan dan penilaian DUPAK. Maka inovasi E-DUPAK ini merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan dari adanya urgensi yang mendasar tanpa adanya perubahan yang signifikan dari tujuan awal pengusulan DUPAK. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Maya Mutia selaku Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beliau menyatakan bahwa:

“Yang paling mendesak ketika adanya pandemi. Sebelumnya sudah sejak lama memikirkan untuk membuat aplikasi namun kebutuhan anggarannya juga cukup besar untuk membuatnya dan dirasa juga belum sangat urgen sehingga belum terlaksana sampai dengan adanya pandemi dan akhirnya di acc oleh pimpinan” (Wawancara dengan ibu Maya Mutia, 09 Februari 2023)

Hal tersebut sejalan dengan pengelolaan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) secara elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah, menunjukkan pemenuhan akuntabilitas jabatan fungsional tertentu,

mendukung fungsi dan tugas melalui penciptaan E-DUPAK yang andal serta dapat digunakan untuk berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mengurangi risiko dengan menjamin bahwa DUPAK yang tepat diciptakan untuk mempertahankan kinerja dan kontinuitas kegiatan.

Aplikasi ini memungkinkan dalam pembuatan laporan secara lebih efisien dan transparan. Selain itu, Sistem aplikasi dapat menyediakan dan meningkatkan pelayanan bagi pegawai untuk mengisi data Jabatan Fungsional dalam mengajukan usulan penetapan nilai kredit dan mempercepat proses pengajuan DUPAK. Dengan Fasilitas ini dapat mengurangi perilaku menyimpang dan menjamin tata kelola yang baik agar terciptanya peningkatan standarisasi dalam memproses data. E-Dupak juga dapat mengurangi duplikasi pekerjaan, meminimalisir biaya dan memberikan informasi secara akurat serta update data kepada pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang akan mempersiapkan pengajuan berkas data DUPAK. Selain itu hal ini didukung oleh penelitian Eprilianto dkk (2019) yang mana dengan adanya sebuah inovasi berbasis teknologi aktivitas pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah karena adanya integrasi data.

Namun, dalam E-Dupak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih banyak kekurangan sistem yang ada di website E-Dupak. Seperti tidak adanya fitur konsultasi dengan admin, dan tidak ada fitur untuk mencetak dokumen yang telah di koreksi dan di usulkan. Sedangkan di era saat ini pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang lebih inovatif dan efektif, sehingga pengusul berharap sistem ini dapat memberikan informasi yang jelas terhadap kebutuhan yang diinginkan. Meskipun pegawai tidak perlu datang secara langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menanyakan alur Dupak, namun pegawai tetap harus mendapatkan informasi yang akurat mengenai berkas yang telah diajukan. Sehingga inovasi e-DUPAK dirasa belum berjalan secara optimal, sebab pegawai mengharapkan proses layanan DUPAK yang lebih efektif dan efisien di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

3. Kerumitan (Complexity)

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit ini merupakan inovasi diterapkan oleh instansi pemerintah yang digunakan sebagai penilaian kepada pegawai untuk meningkatkan karirnya. Pada penerapan DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan menumpuknya berkas dari berbagai instansi dan jabatan pemerintah pegawai membuat tim penilai merasa kesulitan, sebab berkas tersebut tentu ada saja yang tidak terinput dengan baik. Kerumitan hal inilah menjadi penghambat tim penilai dalam penyelesaian tugasnya. Maka pemerintah berupaya membuat inovasi yang

tentunya mempermudah proses DUPAK menjadi lebih efisien dan efektif.

Namun, beralihnya sistem pengurusan DUPAK secara manual menjadi berbasis website tentunya dibutuhkan persiapan yang cukup rumit. Dibutuhkannya tenaga ahli dan kesiapan anggaran merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (DINKES JATIM). Untuk mendukung terlaksananya program e-DUPAK di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempercayakan pada pihak luar atau pihak ketiga untuk membuat sistem aplikasi website e-DUPAK dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum mempunyai tenaga ahli di bidang IT. Perencanaan beralihnya sistem DUPAK menjadi E-service bertujuan untuk dapat menekan angka pengeluaran biaya administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dimana para pemangku kepentingan dapat dengan mudah melakukan akses dan melihat sejauh mana proses pengajuan yang diajukan, dan keterbukaan informasi serta partisipasi dimana melalui E-DUPAK pelayanan dapat tetap dilakukan tanpa harus secara fisik datang ke kantor.

Menurut Kepala Bidang Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tuti Nurhayati E-Dupak Tahun ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat kontrol bagi Tenaga Penyuluh Hukum sebagai dasar penilaian kinerja dari Tenaga Penyuluh Hukum yang telah dilakukan (Jabar & jabar.kemenkumham.go.id;, 2021). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya tingkat kesiapan dari segi kualitas website yang digunakan dan tenaga ahli selaku yang melakukan kontrol dalam keberlangsungan penggunaan sistem tersebut.

Setelah hampir dua tahun penggunaan E-DUPAK berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai respon kepuasan para pemangku kepentingan pengguna E-DUPAK mereka menyebutkan bahwa kegiatan pengusulan angka kredit jauh lebih mudah dan tanpa adanya poin-poin yang perlu diubah hanya saja semua sudah tersistem dan website yang ada sangat mudah untuk diakses dan dimengerti. Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan Ibu Maya Mutia selaku Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beliau menyatakan bahwa:

“Responnya bagus ,kenapa tidak dari dulu, terus terang ya jadi kalau pejabat fungsional di bagian pelayanan itu mungkin dokumen yang dikumpulkan itu hanya rekap kegiatan misalnya dokter tidak mungkin mengumpulkan rekamedis satu-persatu pada periode pengusulan sebab bentuknya laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan. Ini menjadi bukti fisik yang kita minta dan menjadi pengembangan profesi seperti KTI. Dokumen ini diminta oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur satu orang itu tidak banyak.

Namun, kalo administrator kesehatan dan epidemiolog itu kan kerjanya administratif jadi buktinya satu orang bisa satu kardus lebih untuk satu periode penelitian, karena yang diminta bukti kerjaan administratifnya berupa laporan tiap pegawai sehingga mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Sebab dalam satu periode itu macam-macam pengusulannya dan dahulu masih manual memilih berkas fisik juga sulit, namun dari aplikasi lebih mudah hanya pilih filter untuk kebutuhan dan keperluan apa dan biasanya kita dahulukan yang naik pangkat di skala prioritas urgesitasnya.”

Hal tersebut sejalan pula dengan pelayanan E-Dupak bertujuan untuk mewujudkan kegiatan Penyuluhan Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif sesuai dengan Slogan dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu PASTI maka bagi Penyuluh Hukum dalam tugas dan fungsinya perlu dilakukan pembinaan terhadap kinerja dan pengembangan karir secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kabar baik bagi Tenaga Penyuluh Hukum dalam memenuhi kewajiban sebagai Jabatan Fungsional Tertentu, serta mempermudah dalam penyampaian kegiatan dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (Jabar & jabar.kemenkumham.go.id;, 2021).

4. Kemungkinan Mencoba (*Triability*)

Triability atau kemungkinan mencoba merupakan indikator keempat dalam sebuah inovasi yang digunakan apakah inovasi ini bisa diterima jika dicoba dan apakah terbukti menguntungkan dibandingkan dengan sebelum adanya inovasi ini. Penerapan E-Dupak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lolos uji coba dalam mempermudah pegawai unggah dokumen untuk peningkatan karir pegawai dan juga mendorong petugas memberikan pelayanan dengan baik.

Website E-Dupak ini masih digunakan sebagai acuan dalam peningkatan karir pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, selain itu juga mempermudah Sub bagian Tata Usaha pada Bidang Kepegawaian dalam penyeleksian dokumen pengusul Dupak. Dengan adanya respon positif pengguna terhadap E-Dupak menjadi tolak ukur bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur guna adanya evaluasi penggunaan E-Dupak agar dapat memberikan dimanfaatkan bagi pengusul, tim penilai dan instansi. Selain itu dari hasil penelitian Andiyana dan Meirinawati (2016) mengatakan bahwa pelayanan yang diimbangi oleh sebuah inovasi menghasilkan respon positif dari masyarakat.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Melalui e-DUPAK kebermanfaatannya tentunya dirasa oleh seluruh elemen yang berkepentingan dalam kepengurusan pengajuan penetapan angkat kredit. Website ini merupakan sebuah inovasi yang sebelumnya juga telah diterapkan oleh instansi lain dan Dinas Kesehatan menerapkan saat kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan pegawai berinteraksi secara langsung. Hal tersebut telah disampaikan pula oleh Ibu Maya Mutia selaku Analis Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beliau menyatakan bawah:

“Pertama manfaat bagi peserta E-Dupak: mereka tidak perlu mengumpulkan berkas fisik dan dari segi biaya lebih ringan karena tanpa cetak dokumen dan mengirimkan hardfilenya. Manfaat bagi instansi: mereka tidak menumpuk dokumen dan tanggung jawab pegawai juga lebih besar untuk mengirim dokumen yang banyak, berat dan kirim via pos juga mahal sebab jika yang ngirim instansi biaya ikut instansi, sedangkan kalau perorangan biaya ditanggung pengusul sendiri. Sedangkan manfaat untuk Dinas Kesehatan; sangat menghemat tempat dan dalam satu periode penilaian untuk tracking proses jauh lebih mudah dari sebelumnya yang mengharuskan pegawai membongkar dokumen digudang untuk melihat tracking data usulan pegawai.”

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya dengan E-Dupak ini memberikan kemudahan pada setiap elemen terkait pada proses Daftar Usulan Angka Kredit di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana dengan baik hingga proses akhirnya. Sehingga dengan adanya website ini perlu disosialisasikan kembali ke peserta guna dapat meningkatkan karir pegawai yang menjabat di posisi Jabatan Fungsional Tertentu dan juga membantu kenaikan jabatan para pegawainya.

Faktor Penghambat Inovasi E-Dupak Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membutuhkan teknisi atau konsultan yang merupakan tenaga ahli dibidang tenaga Informasi dan Teknologi dalam pembuatan dan pengembangan website E-Dupak. Pegawai yang merupakan ahli pengembangan inovasi ini masih belum ada sehingga masih membuat tim khusus dari luar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan website E-Dupak. Jadi tidak adanya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkomoetensi dalam pengembangan website E-Dupak sebagai pendukung pelaksana yang masih menggunakan jasa ahli yang berkompeten untuk pemeliharaan sistem website E-Dupak.

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa website e-DUPAK dirasa masih kurang sempurna karena sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum berkompeten di bidangnya, sehingga dapat disimpulkan pada pelaksanaan e-DUPAK agar lebih optimal. Sebaiknya pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi dan informasi sehingga sistem dari inovasi ini dapat di terapkan dengan baik. Apabila pembaharuan sistem dan juga kerusakan *softwere* yang dipakai bisa diatasi oleh pegawai ahli dibidangnya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanpa melibatkan pihak luar atau ketiga.

2. Half Implemented

Elektronik Daftar Usulan Angka Kredit (e-DUPAK) masih belum sempurna, sehingga website e-DUPAK perlu adanya penyempurnaan sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional dalam pengajuan proses DUPAK. Website e-DUPAK tidak hanya sebagai pengajuan syarat-syarat usulan namun juga sebagai media konsultasi dalam memberikan informasi kepada Jabatan Fungsional Tertentu. Website yang belum sempurna berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan inovasi E-Dupak untuk kedepannya.

Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan evaluasi terhadap website E-Dupak sehingga dapat terlaksana secara optimal dan juga mencapai output yang diinginkan.



Gambar 6. Rapat Pleno Tim Khusus E-Dupak

Sumber: Website E-Dupak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dari rapat pleno diatas membuktikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk terus mengevaluasi website e-DUPAK agar dapat digunakan oleh pemangku jabatan. Diharapkan website e-DUPAK perlu dikembangkan agar sistem e-DUPAK jauh lebih optimal dari sebelumnya.

3. Anggaran

Website E-Dupak diluncurkan pada Agustus tahun 2021 pada saat terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Instansi pemerintah pusat maupun daerah memikirkan upaya untuk menghadapi kondisi tersebut dengan memberlakukan *Work From Home* (WFH) terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir penyebaran wabah tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berupaya tetap memberikan pelayanan dengan meminimalisir interaksi secara langsung dengan menerapkan inovasi E-Dupak namun pelaksanaannya mengalami hambatan karena belum sempurnanya sistem aplikasi website e-DUPAK disebabkan oleh keterbatasan biaya yang dialokasikan untuk pembuatan Aplikasi e-DUPAK yang bersumber dari DPPA Mendahului II Provinsi Jawa Timur dari Anggaran 2021 Nomor 914/7.P/203.2/2021 sebesar Rp. 95.000.000,00 sudah termasuk Ppn.

PENUTUP

Simpulan

Peningkatan karir pegawai harus memenuhi beberapa kriteria dalam persyaratan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh instansi pemerintahan penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia yang memadai. Salah satu instansi pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengembangkan suatu pelayanan berupa aplikasi berbentuk web yang berguna dalam penilaian dan penetapan angka kredit yang dikhususkan untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dari UPT serumpun kesehatan yang di bawah oleh di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan e-DUPAK (Elektronik Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit). Disimpulkan bahwa dengan demikian penerapan sistem aplikasi e-DUPAK dapat meminimalisir sistem birokrasi dan terciptanya peningkatan standarisasi proses. Disamping itu, sistem aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional kepegawaian dalam pengajuan usulan penetapan angka kredit dan percepatan proses usulan DUPAK. Kemudahan-kemudahan tersebut dapat mengurangi tindakan penyimpangan.

Peneliti menganalisis peningkatan karir pegawai melalui program inovasi tersebut dengan dikaitkan oleh pendapat dari pendapat dari Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul '*Diffusion Innovations*' tahun 1964 yaitu 1) keuntungan relatif mendorong untuk menciptakan adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam pengurusan DUPAK yang mana dilaksanakan secara elektronik solusi pengumpulan dokumen saat wabah Covid-19 hingga saat ini,

2) kesesuaian dengan pengelolaan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) secara elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah, 3) kerumitan mengenai respon kepuasan para pemangku kepentingan pengguna E-DUPAK mereka menyebutkan bahwa kegiatan pengusulan angkakredit jauh lebih mudah, 4) kemungkinan mencoba adanya E-Dupak Di Dinas Kesehatan telah lolos uji cobadalam memepermudah peserta unggah dokumen untuk peningkatan karir pegawai dan juga mendorong petugas memberikan pelayanan dengan baik5) kemudahan diamati dengan E-Dupak ini memberikan kemudahan pada setiap elemen terkait, yang mana proses Daftar Usulan Angka Kredit di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana dengan baik hingga proses akhirnya. Selain itu, dari setiap indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya evaluasi pada setiap program pelaksanaan E-Dupak agar data yang di unggah juga terbackup dengan baik jika sewaktu-waktu terdapat hal yang tidak diinginkan seperti pembobolan data pegawai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini saran agar menjadi pertimbangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan tenaga ahli yang berkompeten dibidang teknologi informasi, Apabila pembaharuan sistem dan juga kerusakan *softwere* yang dipakai bisa diatasi oleh pegawai ahli dibidangnya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanpa melibatkan pihak luar atau ketiga agar bisa memantau secara teknis untuk mempermudah pelaksanaan e-DUPAK kedepannya. Melakukan evaluasi terhadap penambahan fitur-fitur baru yang belum tersedia seperti kolom komentar tim penilai, pemilahan dokumen yang ternilai dan belum ternilai secara up to date, dan juga adanya fitur download berkas sebagai finalisasi penilaian peserta. Mengadakan sosialisasi pada tiap rumah sakit dalam upaya meningkatkan keinginan pegawai dalam meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Azmy, A., Ahzani, F., Susilowati, M., & Arif, L. (2020). 76-Article Text-547-2-10-20220720. *I(6)*, 206–213.
- Badan Kepegawaian Negara. (2018). *Aplikasi e-DUPAK Buku Petunjuk Pengguna / versi 01.00.12*, 0–55.
- Chotib, A. S. (2020). Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Dosen Berbasis Web (Studi Kasus PAK Online Kopertais Wilayah I DKI Jakarta). *Applied Information System and Management (AISM)*, *3(1)*, 21–30. <https://doi.org/10.15408/aism.v3i1.16189>
- Citra, Meirinawati. 2016. Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujunpangkah Kabupaten Gresik. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, (7).
- Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *4(1)*, 30. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37>
- Everett Rogers. 1964. Teori Difusi Inovasi: Pengertian, Jenis, Elemen, Tujuan.
- Hepi, Y. (2015). *1 : 2 : Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Secara Online Berbasis Website Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*
- Herawati, P. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Pemerintah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *4(1)*, 958–961. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1279>
- Jabar, K., & jabar.kemenkumham.go.id; (2021). *Kegiatan Pembinaan Penyuluh Hukum dan Sosialisasi Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh Hukum (E-DUPAK). E-DUPAK Permudah Penilaian Angka Kredit Penyuluh Hukum*. Jabar.Kemenkumham.Go.Id.
- Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian. (2001). *Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: Kep. 1106/Ka/08/2001 Nomor: 34 A Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya Kepala Badan Perencanaan P. 1–23.*
- Kusmayadi, E. (2020). Penerapan Dupak Online bagi pustakawan di Kementerian Pertanian. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, *19(1)*, 42–52. <https://doi.org/10.29244/jpi.19.1.42-52>
- Maksum, A. (2018). *Metodologi Penelitian dalam Olahraga*. Universitas Negeri Surabaya.
- Muslihuddin, & C.K, E. (2017). Aplikasi Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota. *Jutisi (Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, *6(2)*, 1449–1588.
- Nakertrans.sumbarprov.go.id; (2021). *Rapat Koordinasi Penyusunan Aplikasi Dupak Elektronik*. 03 Februari 2021.
- Puspita Sari, M. E. (2018). Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika*, *2(1)*, 1. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1234>
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4(2)*, 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>

